

Juni 2019

Transformasi Tata Kelola Penelitian di Perguruan Tinggi

Zuliansyah P. Zulkarnain, Reza Fathurrahman,
Rd Kaleb Putro Setio Kusumo, Givo Aulia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai masalah terjadi dalam pengelolaan kelembagaan LPPM di Perguruan Tinggi. Masalah yang terjadi antara lain adalah (i) kualitas lembaga penelitian di Indonesia maupun kolaborasi antara universitas dan industri dalam inovasi masih berada pada level menengah, (ii) berdasarkan hasil release dari The Global Competitiveness Report 2017-2018 yang dirilis oleh World Economic Forum (lihat Schwab, 2018), menunjukkan bahwa kualitas lembaga-lembaga penelitian di Indonesia maupun tingkat kolaborasi antara pihak universitas and industri masih jauh dari ideal (dengan skor berturut turut 4,4 dan 4,3 dari skala penilaian 7). Beberapa rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas riset di Perguruan Tinggi. (1) pembentukan payung hukum dan upaya sistematis untuk meningkatkan proses kolaborasi yang bersifat resipikal antara pemerintah daerah dan universitas, (2) penyamaan persepsi mengenai logika pelaporan keuangan penelitian antara Kemenristekdikti, Kemenkeu dan BPK, (3) Kemenristekdikti perlu memberikan perhatian yang memadai dalam mengidentifikasi dan mengatasi pangkal permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana hibah riset DIKTI, (4) diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mengakomodir penjelasan tambahan bagi pengaju proposal riset yang tidak disetujui sebagai bahan perbaikan ke depan, (5) Kemenristekdikti perlu mensosialisasikan kepada seluruh manajemen perguruan tinggi agar dapat memperhatikan keselarasan antara rencana berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (6) diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengeksplorasi strategi tatakelola anggaran penelitian yang paling efektif dalam konteks penelitian di perguruan tinggi. Pada penelitian ini, kendala yang dihadapi adalah kurangnya data sekunder yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang diteliti, sehingga menyulitkan untuk melakukan triangulasi hasil dari wawancara.

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN LPPM DI PERGURUAN TINGGI

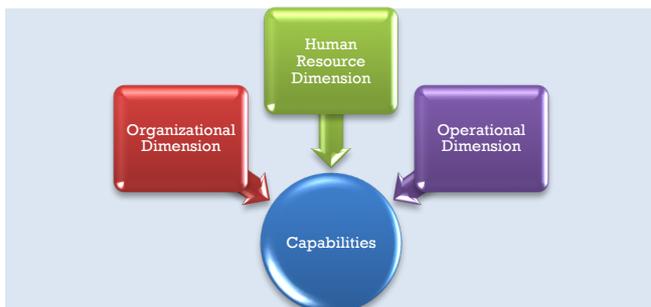
Selain dari masalah pencapaian inovasi dan jumlah paten, terdapat beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi kualitas kelembagaan LPPM di Perguruan Tinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) di lingkungan Universitas Indonesia, mengidentifikasi delapan aspek yang menjadi hambatan utama bagi upaya peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi, antara lain meliputi: 1) Kesesuaian kebijakan; 2) Pendanaan Penelitian; 3) Agenda/Prioritas Penelitian; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Remunerasi dan Sistem Insentif; 6) Sistem Kredit Kenaikan Pangkat; 7) Skema Publikasi; dan 8) Manajemen Penelitian. pada aspek kebijakan, Kurniawan menggarisbawahi ketiadaan arah grand strategi riset perguruan tinggi yang jelas serta kekakuan sistem anggaran untuk membangun kolaborasi pada level kelembagaan. Sementara itu, dari aspek pendanaan, Kurniawan menyoroti pendekatan berbagai hibah penelitian yang menekankan pola 'anggaran harus habis terserap' dan memordudukan kebermanfaatan hasil penelitian. Selanjutnya, baik pada level nasional maupun universitas, gambaran peta prioritas penelitian dinilai belum jelas.

Aspek keempat dan kelima berturut-turut berkaitan dengan isu seputar sumber daya manusia dan sistem insentif. Penambahan jumlah mahasiswa yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah dosen membuat para peneliti di perguruan tinggi terbebani dengan tugas mengajar yang banyak dan pada saat bersamaan kekurangan waktu untuk melakukan penelitian. Dua aspek terakhir yang juga dinilai menjadi kendala utama dalam mendongkrak kualitas penelitian di perguruan tinggi berkaitan dengan permasalahan dalam aspek publikasi riset dan isu manajerial. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Subekti dkk (2017) dengan melakukan

investigasi terhadap mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan sejumlah sampel yang merepresentasikan empat klasifikasi perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan kinerja penelitiannya, antara lain: Kampus Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan. Subekti dan rekan-rekannya memfokuskan diri pada tingkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) yang meliputi 7 siklus tahapan penelitian: 1) Perencanaan penelitian; 2) Pendanaan, manajemen, dan fasilitas penelitian; 3) Seleksi proposal penelitian; 4) Pelaksanaan penelitian; 5) Monitoring dan evaluasi penelitian; 6) Pengelolaan hasil penelitian; dan 7) Tindak lanjut hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut tantangan utama yang dihadapi oleh kampus yang berada di dalam Klaster Mandiri memiliki tantangan terbesar pada aspek pengelolaan hasil penelitian khususnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan kualitas kemanfaatan. Sementara, perguruan tinggi di tiga klaster lainnya memiliki permasalahan utama berkaitan dengan keterbatasan dari aspek sumber daya.

KERANGKA ANALISIS

Untuk melakukan diagnosis terhadap kelembagaan LPPM di Perguruan Tinggi, penelitian ini menggunakan dimensi diagnosis kapabilitas organisasi dari Immordino (2014), yang merumuskan tiga dimensi yang meliputi: (i) dimensi organisasi, yang meliputi visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi; (ii) dimensi sumber daya manusia, yang terdiri dari kepemimpinan, relasi dengan pemangku kepentingan, sumber daya manusia-lingkungan kerja; dan (iii) dimensi operasional, yaitu, perencanaan strategis, program-proses, penilaian-analisa, dan hasil.



Gambar 1. Dimensi Diagnosis Kapabilitas Organisasi
Sumber: Immordino (2014)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan interpretivism yang tujuannya adalah menggali pemaknaan atas fenomena atau kasus penelitian. Dalam konteks ini, penggalian dan pemaknaan ditujukan pada peran dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.

Studi Kasus dan Metode Analisa.

Penelitian dengan menggunakan studi kasus pada dasarnya berupaya untuk melakukan suatu kajian yang intensif atas kasus-kasus tertentu yang dapat merepresentasikan kasus yang relatif sejenis. Studi kasus penelitian adalah LPPM di 5 (lima) universitas yang dipilih berdasarkan (i) status perguruan tinggi, yaitu, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan Badan Layanan Umum (BLU) serta Swasta; dan (ii) Klaster Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Mandiri dan Utama. Berdasarkan pengelompokan tersebut studi kasus dilakukan terhadap Universitas Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanudin.

Tabel 1. Studi Kasus LPPM Perguruan Tinggi

	PTN BH	BLU	SWASTA
MANDIRI	UNHAS	UNUD	UMM
UTAMA	USU	UNESA	NA

Wawancara Mendalam.

Untuk keperluan penelitian, pengambilan data primer akan dilakukan dalam dua tahapan: Pengambilan data tahap pertama akan dilakukan melalui semi-structured interview dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Kepala LPPM, dan Perwakilan Dosen di Tingkat Fakultas.

IDENTIFIKASI KEY ISSUES ANTAR PERGURUAN TINGGI

Dimensi 1 - Organisasi

Pada aspek organisasi, ditemukan enam isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pertama berkaitan dengan isu "Identifikasi Bidang Unggulan Riset" (sesuai dengan panduan yang diberikan DIKTI). Selain itu, proses penyusunan Rencana Strategis Penelitian masing-masing kampus pada umumnya melibatkan seluruh stakeholder internal kampus mulai dari level prodi, fakultas, hingga universitas. Namun, yang menjadi catatan menarik adalah proses diskusi untuk memfinalisasikan dokumen Renstra Penelitian dilakukan tanpa melibatkan pihak eksternal/luar kampus. Isu ketiga yang mengemuka secara konsisten di seluruh perguruan tinggi berkaitan dengan "Struktur dan Fungsi LPPM". Meskipun seluruh pimpinan perguruan tinggi sepakat bahwa pertimbangan efisiensi dan efektivitas kinerja merupakan landasan utama dalam menentukan struktur dan fungsi LPPM, namun ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah unit pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat idealnya "berada dalam satu lembaga" atau "terpisah pada dua lembaga".

Para pengelola riset di perguruan tinggi memandang bahwa aktivitas riset yang dilaksanakan oleh para dosen peneliti setidaknya dapat menghasilkan tiga jenis output: 1) Meningkatkan reputasi internasional kampus; 2) Menghasilkan artikel dan menambah jumlah publikasi internasional; dan 3) Menghasilkan pendapatan tambahan bagi universitas (revenue generating). Adapun isu kelima

berkaitan dengan “Pengelolaan Anggaran Riset”: Terpusat (dikoordinir oleh rektorat) vs Terdistribusi (dikelola secara mandiri oleh fakultas). Isu terakhir dalam aspek organisasi menyoroti “Pola Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pihak Eksternal”. Seluruh pengelola LPPM atau Lembaga sejenis di seluruh kampus yang menjadi objek penelitian ini bersepakat bahwa kolaborasi apa pun yang membawa nama universitas harus diketahui dan terdata dengan baik oleh pimpinan perguruan tinggi terkait.

Dimensi 2 – Sumber Daya Manusia

Pada dimensi sumber daya manusia, *focal point* pertama yang dikemukakan oleh responden terkait dengan “Insentif dan Disinsentif”. Secara umum seluruh perguruan tinggi yang diteliti telah mengalokasikan sejumlah dana untuk memberikan insentif finansial kepada para dosen peneliti yang memiliki kinerja riset yang baik. Selain itu, dukungan yang umumnya diberikan oleh para pengelola LPPM untuk mengatasi beban administratif yang umumnya dialami peneliti, khususnya pada saat mensubmit aplikasi hibah penelitian dan penyusunan laporan keuangan, terbagi ke dalam dua poin, yaitu “Pembekalan Bagi Peneliti” dan “Pendampingan Administrasi”. Isu lainnya berkaitan dengan upaya untuk menyelaraskan antara kewajiban mengajar dan riset (*Research or Teaching Heavy*). Dari lima universitas yang diteliti, hanya Unhas yang memiliki sebuah skema khusus untuk memberikan status “Dosen Riset” sebagai alternatif strategi dalam mengatasi isu tersebut.

Dimensi 3 – Operasional

Dari aspek operasional, Isu yang sangat sering dikeluhkan oleh peneliti berkaitan dengan “Hibah Dikti yang Telat Turun” dan “Administrasi Hibah Dikti yang Lebih Sulit Daripada Hibah Internal”. Kondisi tersebut membuat sejumlah peneliti merasa kesulitan karena tidak dapat melakukan aktivitas penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sementara deadline pelaporan hasil penelitian harus diserahkan tepat pada waktunya kepada DIKTI. Isu lain yang mengemuka terkait dengan “Logika Pelaporan Keuangan”. Secara konsisten, baik pada level pimpinan/pengelola LPPM maupun individu dosen, responden umumnya mengeluhkan adanya perbedaan logika pelaporan keuangan antara DIKTI dan BPK/Kementerian Keuangan. Terakhir yang penting untuk dicatat berkaitan dengan “Kualifikasi dan Netralitas Reviewer”. Sejumlah individu dosen mengeluhkan berkaitan dengan isu kualifikasi dan netralitas reviewer di tingkat rektorat dalam mengawal proses seleksi hibah internal yang diberikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

REKOMENDASI

Pertama, diperlukan payung hukum dan upaya sistematis untuk meningkatkan proses kolaborasi yang bersifat resiprokal antara pemerintah daerah dan universitas. Dalam hal ini, Kemenristekdikti dan Kemendagri perlu bertemu untuk membahas sinergisasi antara kegiatan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dengan kebutuhan aktual pemda sebagai basis untuk menjawab permasalahan riil yang dihadapi masyarakat (*evidence-based policy*).

Kedua, perlu penyamaan persepsi mengenai logika pelaporan keuangan penelitian antara Kemenristekdikti, Kemenkeu dan BPK. Diperlukan perhatian khusus untuk memastikan peneliti tidak terlalu terbebani dengan pelaporan administratif yang kurang mengakomodir penilaian berbasis output.

Ketiga, Kemenristekdikti perlu memberikan perhatian yang memadai dalam mengidentifikasi dan mengatasi pangkal permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana hibah riset DIKTI untuk memberikan ruang yang cukup bagi peneliti untuk melakukan aktivitas risetnya secara optimal. Kemudian Kemenristekdikti perlu membuat mekanisme *controlling* keuangan dana riset.

Keempat, untuk menjamin transparansi dan netralitas hasil review baik di tingkat perguruan tinggi maupun di level DIKTI, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mengakomodir penjelasan tambahan bagi pengaju proposal riset yang tidak disetujui sebagai bahan perbaikan ke depan. Kemenristekdikti perlu memperbanyak reviewer nasional dan meningkatkan kualitas dari reviewer

Kelima, terlepas dari adanya dua jenis perspektif dalam memandang hubungan antara penelitian dan perguruan tinggi yang ditemukan di dalam studi ini, Kemenristekdikti perlu mensosialisasikan kepada seluruh manajemen perguruan tinggi agar dapat memperhatikan keselarasan antara rencana berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan dampak yang positif bagi kemaslahatan masyarakat. Serta riset di Universitas sudah harus mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Keenam, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengeksplorasi strategi tatakelola anggaran penelitian yang paling efektif dalam konteks penelitian di perguruan tinggi: “Terpusat di rektorat” vs “terdistribusi di fakultas”; serta “dikelola oleh individu/tim peneliti” vs “dipegang oleh personil/unit khusus”. Dalam hal ini Pilot project di perguruan tinggi mandiri terpilih (yang turut mengakomodir keragaman rumpun keilmuan: Sains, Sosial Humaniora, dan Kesehatan) dapat menjadi bahan pertimbangan untuk studi lanjutan.